

PENGARUH RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DI KOTA TEBING TINGGI

Dedy Hertino¹, Galumbang Hutagalung², Pinondang Nainggolan³, Ringkop Situmeang⁴

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Reses DPRD Terhadap Pembangunan Di Kota Tebing Tinggi. Keberhasilan pembangunan membutuhkan dukungan semua pemangku pelaksanaan pembangunan. Populasi penelitian ini adalah penduduk kota Tebing Tinggi yang terdaftar pada BPS 2016 yang berjumlah 158.902 jiwa. Dengan menggunakan rumus penarikan sampel, maka sampel penelitian sebesar 100 orang. Penelitian ini menggunakan regresi sederhana, metode analisis dan pengujian hipotesis. Penelitian ini memberikan informasi bahwa reses DPRD memiliki pengaruh terhadap pembangunan. Pengolahan data dilakukan dengan menggumpulkan data hasil kuesioner dan pengolahannya menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh reses DPRD terhadap pembangunan sebesar 0,200 atau 22,0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa reses DPRD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi bahwa pembangunan membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembanguana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepada berbagai pihak terkait.

Kata Kunci : Reses, DPRD, Pembangunan, Tebing Tinggi

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of the DPRD recess on development in the city of Tebing Tinggi. The success of development requires the support of all stakeholders in the implementation of development. The population of this study is the population of the city of Tebing Tinggi which is registered at the 2016 BPS, totaling 158,902 people. By using the sampling formula, the research sample is 100 people. This study uses simple regression, analysis methods and hypothesis testing. This study provides information that the DPRD recess has an influence on development. Data processing was carried out by collecting questionnaire data and processing it using SPSS. From the research results it is known that the effect of the DPRD recess on development is 0.200 or 22.0%. So it can be concluded that the DPRD recess has a significant influence on development in the City of Tebing Tinggi. This research contributes thoughts and suggestions to the Tebing Tinggi City Government that development requires full support from the Tebing Tinggi City Government, the community actively participates in development to improve people's welfare and to various related parties.

Keywords : Recess, DPRD, Development, Tebing Tinggi

PENDAHULUAN

Sarana dan Prasarana (infrastructure) sering diartikan sebagai bangunan fisik untuk kesejahteraan dan keselamatan umum (seperti jalan, pelabuhan, bandara, jembatan, tenaga listrik, telekomunikasi, irigasi, air bersih, dan sanitasi), merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan bahkan sosial-politik

(sebagaimana diindikasikan oleh daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik dan stabilitas sosial politik yang mantap).

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan “*social overhead capital*” dan terlihat sebagai katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur dapat memberikan gambaran tentang kemampuan memproduksi masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur baik yang berupa penyediaan prasarana dan sarana transportasi, pengairan, bangunan fasilitas umum (*public services*) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sejauh ini memberikan landasan berputarnya roda perekonomian nasional. Namun seiring dengan berlangsungnya krisis ekonomi dan dihadapkan pada tuntutan penyediaan infrastruktur yang semakin kompetitif dalam tatanan global seiring berkembang pesatnya teknologi informasi, maka kondisi fisik maupun pelayanan infrastruktur antar wilayah serta kelengkapan sistem infrastruktur secara nasional memerlukan berbagai upaya peningkatan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam konteks suatu kota, ketersediaan prasarana dan sarana merupakan salah satu prasyarat bagi peningkatan produksi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi kota itu sendiri. Salah satu infrastruktur dasar suatu kota adalah tersedianya prasarana dan sarana yang manfaatnya dirasakan oleh Warga kota tersebut. Prasarana dan sarana dasar tersebut secara umum berperan penting dalam mendukung aktifitas perekonomian masyarakat kota yang dalam hal ini penting dalam menunjang perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota. (Conyers & P Hills, 1984) merinci sarana/fasilitas permukiman dapat meliputi diantaranya :

1. Fasilitas pelayanan ekonomi dan perdagangan, meliputi:
 - a. Warung/kios, merupakan unit usaha ekonomi skala terkecil;
 - b. Pertokoan, merupakan unit usaha ekonomi skala sedang - besar;
 - c. Pusat perbelanjaan skala lingkungan (toko dan pasar); dan
 - d. Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor-kantor + industri kecil).
2. Fasilitas pelayanan sosial, meliputi:
 - a. Fasilitas pendidikan, terdiri dari: Taman Kanak-Kanak (TK); Sekolah Dasar (SD); Sekolah Lanjutan Pertama (SLP); dan Sekolah Lanjutan Atas (SLA).
 - b. Fasilitas kesehatan, terdiri dari: Balai pengobatan; BKIA + Rumah bersalin; Puskesmas dan Balai pengobatan; Rumah sakit daerah/wilayah; Tempat praktek dokter; Dokter; dan Apotek/toko obat.
3. Fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Balai pertemuan; dan
 - c. Tempat hiburan.
4. Fasilitas pelayanan pendukung lainnya, meliputi:
 - a. Taman/tempat bermain (*park/play ground*);
 - b. Jalur hijau; dan
 - c. Tempat pejalan kaki/pedestrian.

Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam hal pemanfaatan sarana, harus mempertimbangkan prinsip efisiensi yang berarti semua pemakai sarana dan prasarana umum haruslah berhati-hati sehingga semua sarana dan prasarana tidak mudah habis, rusak, atau bahkan hilang. Seperti halnya di Kota Tebing Tinggi, telah banyak sarana dan prasarana yang telah termakan zaman, tidak terpelihara dan bahkan pada perkembangan zaman sekarang ini perlu adanya penambahan sarana yang dapat mendukung perkembangan Ilmu pengetahuan masyarakat di Kota Tebing Tinggi seperti pojok wifi, dimana masyarakat Kota Tebing Tinggi dapat mengakses internet dengan Cuma-cuma atau gratis. Untuk itulah perlu adanya revitalisasi sarana dan prasarana dimana dalam proses pemeliharaan sarana dan prasarana tsb haruslah ada penganggaran terlebih dahulu pada APBD di suatu kota, dalam hal ini Kota Tebing Tinggi. Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2002). Dan berdasarkan kebutuhan itulah pentingnya dilaksanakan *reses* yang merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah. Kewajiban melaksanakan *Reses* termaktub dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan Peraturan DPRD Kota Tebing Tinggi No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tebing Tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dalam usaha menampung aspirasi rakyat yang diwakilinya adalah dengan bertemu dan mendengar secara langsung dari konstituen. Untuk itulah dibutuhkan suatu jeda masa sidang (*reses*) yang mewajibkan para anggota DPRD Kota Tebing Tinggi ke daerah pemilihan masing-masing, membuka ruang aspirasi masyarakat menyampaikan *uneg - uneg* yang berkaitan secara langsung maupun tak langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, transparansi pelaksanaan fungsi perwakilan, dan pertanggungjawaban kerja DPRD Kota Tebing Tinggi kepada masyarakat, dengan kunjungan dan temu konstituen di Dapil masing-masing yang dilakukan perorangan maupun berkelompok oleh DPRD Kota Tebing Tinggi.

Dari kegiatan *Reses* itulah DPRD Kota Tebing Tinggi mengetahui perlu adanya Revitalisasi sehingga Pihak terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat memahami dan merencanakan terhadap revitalisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dimana terwujudnya pembangunan daerah tidak terlepas dengan kedekatan masyarakat (warga) dengan wakilnya yang duduk di pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme pembangunan daerah dalam *checks and balance* untuk saling mengontrol, mengawasi serta mengimbangi dan nantinya diharapkan adanya masukan dari arus bawah (masyarakat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penjelasan yang berhubungan reses DPRD dan pembangunan yang berlangsung di Kota Tebing Tinggi selama periode tahun ini. Untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel penelitian maka dilakukan penelitian penjelasan (*explanatory research*, Singarimbun, 1995). Penyebaran daftar pertanyaan (Kuesioner), Wawancara, Studi Dokumen. Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, maka dilakukan tabulasi dan rekapitulasi data. Data tersebut dianalisa serta dibahas sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang ada. Sedangkan pengolahan data dan proses pengujian statistik diolah dengan menggunakan program SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lokasi dan Keadaan Geografis

Kota tebing tinggi adalah satu dari tujuh kota yang ada di provinsi sumatera utara, yang berjarak sekitar 78 kilometer dari kota medan. Kota tebing tinggi terletak pada 3°19'00" _3°21'00" lintang utara dan 98°21' bujur timur. Kota tebing tinggi berada dibagian tengah kecamatan tebing tinggi kabupaten serdang bedagai yang dibatasi oleh PTPN III rambutan di sebelah utara, PT. Socfindo kebun tanah besi di sebelah timur, PTPN III kebun pabatu di sebelah selatan, dan PTPN III kebun gunung Pamela Bandar bejambu di sebelah barat.

Hingga desember 2014, kota tebing tinggi terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan dengan luas wilayah 38,438 km². kecamatan padang hilir merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 11,441 km² atau 29,76 % dari luas kota tebing tinggi. sebagian besar (45,55%) lahan di kota tebing tinggi dipergunakan sebagai lahan pertanian. Adapun batas-batas wilayah tersebut:

- ❖ Sebelah utara : PTPN III kebun rambutan kecamatan tebing tinggi kabupaten Serdang Bedagai
- ❖ Sebelah timur : PT. Socfindo kebun tanah besi kecamatan tebing tinggi kabupaten Serdang Bedagai
- ❖ Sebelah selatan: PTPN III kebun pabatu kecamatan tebing tinggi kabupaten Serdang Bedagai
- ❖ Sebelah barat : PTPN III kebun Bandar bejambu kecamatan tebing tinggi Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 1
Luas Lahan Kota Tebing Tinggi Menurut Penggunaannya

Penggunaan		Luas Lahan	
		Ha	%
1	Pemukiman	2882,1	73,40
2	Sarana Sosekbud	440,19	11,45
3	Perhubungan	14,73	0,30
4.	Pertanian	121,33	3,15
5.	Industri	223,11	5,80
6.	Semak Belukar	11,1	0,2
7.	Lain-lain	219,05	5,7

Sumber: Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi 2017

Kota Tebing Tinggi terletak di dataran rendah pulau Sumatera dengan ketinggian 18 - 34 m di atas permukaan laut. Selama tahun 2016, Kota Tebing Tinggi mengalami hari hujan sebanyak 132 hari dengan curah hujan antara 27 - 29 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada

bulan November dengan curah hujan sebesar 229 mm. Hari hujan terbanyak pada bulan Oktober yaitu selama 14 hari.

Gambaran DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 - 2019

Berdasarkan penetapan kursi DPRD kota tebing tinggi periode 2014 - 2019, partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kota tebing tinggi :

- Partai Golkar	: 5 Kursi
- Partai Demokrat	: 3 Kursi
- Partai PDIP	: 2 Kursi
- Partai PKS	: 2 Kursi
- Partai PAN	: 1 Kursi
- Partai PKPI	: 2 Kursi
- Partai PPP	: 1 Kursi
- Partai Hanura	: 2 Kursi
- Partai Nasdem	: 2 Kursi
- Partai Gerindra	: 3 Kursi
- Partai PKB	: 1 Kursi
- Partai PBB	: 1 kursi
Jumlah	: 25 Kursi

Adapun fraksi - fraksi yang ada pada DPRD kota Tebing Tinggi beserta komposisi dan personalianya :

1. Fraksi Golkar
2. Fraksi Gerindra
3. Fraksi Demokrat
4. Fraksi Nurani Bersatu
5. Fraksi Persatuan Bangsa

Kemudian untuk menunjang kegiatan dan kinerja DPRD Kota Tebing Tinggi maka di bentuklah alat kelengkapan DPRD berdasarkan pada peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai alat kelengkapan DPRD terdiri dari:

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan legislasi daerah
- e. Badan anggaran
- f. Badan kehormatan dan

Penjelasan Responden Atas Variabel Pembangunan

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk variabel Pembangunan (Y) adalah seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2
Jawaban Responden atas Variabel Pembangunan

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Kurang Setuju		Cukup Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Anda puas dgn pembangunan Kota Tebing Tinggi	2	2	12	12	31	31	51	51	4	4
Dari sudut pandang mana kepuasan yang ada maksud terhadap pembangunan Kota Tebing Tinggi	3	3	26	26	31	31	37	37	3	3
Menurut Bapak ibu yang lebih prioritas untuk dilakukanya Pembangunan Kota Tebing Tinggi	4	4	25	25	21	21	47	47	3	3
Pembanguna tersebut telah sesuai dengan usulan warga pada pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi	6	6	17	17	33	33	36	36	8	8
Dukungan masyarakat mempengaruhi belum terlaksananya pembangunan Kota Tebing Tinggi	3	3	16	16	36	36	35	35	10	10
Kepedulian dan kepekaan perumusan kelahiran perundangan. memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah	2	2	13	13	27	27	41	41	17	17
Memperkuat daya dukung DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah.	4	4	25	25	21	21	46	46	4	4
Akuntabilitas pelaksanaan perundangan. memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah.	3	3	22	22	21	21	52	52	2	2
Komunikasi sinergis dengan sesama DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah .	7	7	16	16	36	36	54	54	5	5
Komunikasi sinergis DPRD dgn pemerintah memberikan sumbangan besar pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi	9	9	13	13	27	27	41	41	17	17

Sumber : Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Dari tabel diatas menggambarkan jawaban responden penelitian tentang instrumen penelitian. Kegiatan pembangunan yang telah dilakukan dapat memberikan dampak bagi keberhasilan reses DPRD dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Anda puas dengan pembangunan Kota Tebing Tinggi umum Responden menjawab setuju sebanyak 51 orang (51,00%). Dari sudut pandang mana kepuasan yang anda maksud terhadap pembangunan Kota Tebing Tinggi responden menjawab setuju sebanyak 37 orang (37,00 %). Menurut Bapak ibu yang lebih prioritas untuk dilakukanya Pembangunan Kota Tebing Tinggi responden menjawab setuju sebanyak 47 orang (47,00 %). Pembanguna tersebut telah sesuai dengan usulan warga pada pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi responden yang menjawab setuju sebanyak 36 orang (36,00 %) Dukungan masyarakat mempengaruhi belum terlaksananya pembangunan Kota Tebing Tinggi responden menjawab setuju sebanyak 35 orang (35,00 %). Kepedulian dan kepekaan perumusan kelahiran perundangan. memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah responden menjawab setuju sebanyak 41 orang (41,00%). Memperkuat daya dukung DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah responden menjawab setuju sebanyak 46 orang (46,00%). Akuntabilitas pelaksanaan perundangan. memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah responden menjawab setuju sebanyak 52 orang (52,00 %). Komunikasi sinergis dengan

sesama DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah responden menjawab setuju sebanyak 54 orang (54,00 %). Komunikasi sinergis DPRD dengan pemerintah memberikan sumbangan besar pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi responden menjawab setuju sebanyak 41 orang (41,00 %). DPRD kota Tebing Tinggi sudah melakukan seupaya mungkin agar semua aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan untuk merubah pembanguna di kota Tebing Tinggi yang akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kota Tebing Tinggi

Analisis Deskriptif Data Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil analiss deskriptif, menunjukkan nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), rata - rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti untuk hipotesis, baik itu variabel bebas yaitu Reses DPRD dan variabel terikat yaitu Pembangunan . Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3
Analisis Deskripsi Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Reses DPRD	100	11	35	33.36	5.781
Pembangunan	100	15	42	31.74	4.516
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Dari Tabel di atas diperoleh informasi bahwa rata - rata Reses DPRD sebesar 33,36 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 35 dan nilai terendah sebesar 11 sedangkan standar deviasinya sebesar 5,781. Masyarakat memberikan tanggapan tertinggi sebesar 35 atas instrumen pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan Reses DPRD yang dilakukan. Rata - rata variabel pembangunan sebesar 31,74 nilai tertinggi sebesar 42 dan nilai terendah sebesar 15 sedangkan stándar deviasinya adalah 4,516. pembangunan memiliki sumbangan dan peranan besar sehingga 42 orang masyarakat memberikan tanggapan betapa pentingnya pembangunan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian tentang kegiatan reses DPRD yang dilakukan dapat memberikan dampak bagi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Dari hasil wawancara saya masyarakat yang tinggal di setiap Kelurahan pernah mengetahui adanya Kegiatan kunjungan Reses DPRD. Memang ada DPRD yang datang ke kelurahan dan mengumpulkan masyarakat satu kelurahan kami karena anggota DPRD yang datang adalah berdasarkan dari Dapil kami. masyarakat pernah mengikuti kegiatan Reses Anggota DPRD di daerah sating kelurahan dan pernah mendengarkan DPRD menyampaikan perencanaan pembangunan ke tempat kami, mereka menyampaikan rencana pembangunan dan menerima semua aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan Reses tersebut masyarakat pernah memberikan usulan terhadap pembangunan untuk kemajuan kota Tebing Tinggi semua menyampaikan usulan dan harapan apa yang akan dibangun di daerah kami. Dalam kegiatan Reses tersebut hal yang perlu di sampaikan kepada warga yang mengikuti Kegiatan Reses tersebut adalah mengenai apa saja yang paling urgen yang akan dibantu oleh pemerintah, yang disampaikan terutam rencan pembangunan sarana transportasi seperti jalan. usulan masyarakat tersebut ditanggapi oleh Anggota DPRD yang melaksanakan Reses kepada

masyarakat dan menyampaikan usulan dan harapan agar secepatnya direalisasi. Tanggapan dari Anggota DPRD terhadap usulan yang disampaikan masyarakat akan ditindak lanjuti pembangunan yang diusulkan. Jika usulan masyarakat belum terealisasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya pembangunan tersebut masih ada pembangunan yang lebih diutamakan pembangunannya usulan masyarakat belum semua terealisasi, masyarakat pasti melihat langsung realisasi terhadap usulan tersebut usulan yang dan sebagian usulan sudah direalisasi dan sudah ada seperti jalan yang sudah dibangun. Dari usulan tersebut, pada pembangunan Kota Tebing Tinggi, sudah disampaikan DPRD kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk ditindak lanjuti pemerintah sudah melaksanakan pembangunan, usulan kami sudah direalisasi. Kritik ataupun saran yang ingin disampaikan masyarakat untuk kemajuan kota Tebing Tinggi terhadap pembangunan pembangunan ekonomi yang paling diutamakan. dalam reses DPRD sudah menerima semua usulan ataupun aspirasi masyarakat mengenai pembanguna di Kota Tebing Tinggi yang akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kota Tebing Tinggi.

Hasil lapangan tentang kegiatan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan dampak bagi keberhasilan reses DPRD dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat belum dapat mengatakan puas dengan pembangunan Kota Tebing Tinggi, tapi sudah dapat kita rasakan dan kita makainya. Dari sudut pandang masyarakat kepuasan yang ada terhadap pembangunan Kota Tebing Tinggi, seperti pembangunan transportasi jalan dan penerangan jalan-jalan. yang lebih prioritas untuk dilakukanya Pembangunan Kota Tebing Tinggi pembangunan yang berkegiatan langsung dengan kegiatan ekonomi. Pembanguna tersebut telah sesuai dengan usulan warga pada pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sudah hampir semua dilaksanakan walaupun masih banyak yang berhubungan langsung. Dukungan masyarakat mempengaruhi belum terlaksananya pembangunan Kota Tebing Tinggi. Ikut menikmati dan menggunkan pembangunan yang telah dibangun. Kepedulian dan kepekaan perumusan kelahiran perundangan memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah agar membangun suatu usulan agar kuta hukumnya dan ada manfaatnya serta mempergunakan menjadi jelas. Memperkuat daya dukung DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah karena DPRD dapat memerintah Pemerintah agar dilaksanakan pembangunanya dan menyetujuinya. Akuntabilitas pelaksanaan perundangan memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah karena pembangunanya yang begitu bermanfaat tujuannya. Komunikasi sinergis dengan sesama DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah didalam rapat DPRD mengusulkan pembanguna yang akan dibangun. Komunikasi sinergis DPRD dengan pemerintah memberikan sumbangan besar pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi DPRD telah menerima aspirasi masyarakat mengenai pembangunan. DPRD kota Tebing Tinggi sudah melakukan seupaya mungkin agar semua aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan untuk merubah pembanguna di kota Tebing Tinggi yang akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kota Tebing Tinggi.

Yang menjadi topik bahasan dalam Reses tersebut adalah mendengarkan keluhan-keluhan warga yang tinggal di daerah tersebut. Dalam kegiatan Reses itu responden menyampaikn usulan - usulan untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada dilingkunga tsb, yaitu mengusulkan perbaikan parit yang menjadi drainase di lingkungan tsb dan revitalisasi rumah ibadah (Mushollah) yang sudah sejak lama tidak pernah diremajakan akan

tetapi masih digunakan oleh warga sekitar lingkungan tsb. Dimana usulan responden mendapat tanggapan positif dari anggota DPRD yang melaksanakan Reses dengan menjelaskan bahwa usulan tsb akan dicoba disampaikan ke Instansi yang menanganinya melalui Walikota Tebing Tinggi agar dapat direalisasikan pada tahun berikutnya, sebagai informasi bahwa usulan revitalisasi rumah ibadah tersebut telah berulang - ulang diusulkan oleh warga akan tetapi baru di Tahun 2017 inilah usulan tersebut dapat direalisasikan dimana perbaikan parit masih dalam pengerjaan tetapi belum rampung sementara revitalisasi Rumah ibadah telah selesai dikerjakan walaupun belum 100% hasilnya. Oleh karena itulah responden belum merasa puas akan hasil realiasi yang telah selesai dikerjakan. Dalam hal ini responden menyampaikan kritik kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar pembangunan yang sifatnya religi segeralah dibangun dan diselesaikan agar masyarakat dapat nyaman dalam beribadah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam sebelumnya maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Reses DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan di Kota Tebing Tinggi yang ditandai dengan nilai t_{hitung} untuk variable pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan Nilai t_{tabel} untuk variabel Reses DPRD (4,957) lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} (2,92) atau nilai sig (0,000) lebih kecil dari alpha (0,005). Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,200 atau 20,0 % yang menunjukkan kemampuan Reses DPRD dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Pembangunan di Tebing Tinggi sebesar 22,0%, sedangkan sisanya sebesar 80,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model misalnya pendidikan masyarakat, program pemerintah, dan lain - lain.
2. Pembangunan di Kota Tebing Tinggi yang dilakukan oleh Pemerintah belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat, masih banyak pembangunan yang belum dilaksanakan baik pembangunan yang langsung kegiatan ekonomi maupun pembangunan kesehatan dan pembangunan pendidikan dalam pembangunan di Kota Tebing Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3)
- Soekitjo Notoatmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Cet. III; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005).
- Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (cet. XII; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002).
- Imam Suprayogo dan Topbroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- SKPD 2016. Laporan Reses I Tahun 2016 Dapil III Kecamatan Rambutan dan Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Siregar, M. A. N., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit PTPN - IV Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah Di Desa Kedai Damar Kecamatan Pabatu Kabupaten

- Serdang Badagei. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 39 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.578>
- Gultom, M., Silalahi, M., Hutagalung, G., & Marbun, J. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu Di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Regional Planning*, 2(1), 26-41
- Tampubolon, A. N., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Lokal Tepi Danau Toba Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 67-78
- Hasibuan, I., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Interaksi Desa Kota Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Di Desa Perbatasan). *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 79 - 88.
- Simanjuntak, D. H., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2021). Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 1-15
- Hidayatullah, H., & Pribadi, U. (2016). Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 339-367.
- Hamida, R. P. (2014). Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya (Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode 2004-2009. Laporan Penelitian di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 4(2), 380-395.
- Kariem, M. Q., & Ishmatuddin, N. (2020). Analysis of the Legislative Function of Banyuasin Regency Legislative Council Members during the Recess Period. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(1), 29-34.
- Susanto, H., Ernungtyas, N. F., Prisanto, G. F., & Afriani, A. L. (2021). Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja: Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (SUMUT 1). *Jurnal Representamen Vol*, 7(01).